

**TATA KELOLA KEUANGAN PADA PROGRAM
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2022**
(Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
Provinsi Sumatera Selatan

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :
M. DAFFA LUTFIANSYAH
NIM. 07011382025208

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TATA KELOLA KEUANGAN PADA PROGRAM
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN
2022**

(Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi)
Sumatera Selatan

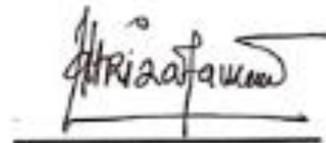
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

Oleh:
**M. DAFFA LUTFIANSYAH
NIM.07011382025208**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 15 Mei 2024
Pembimbing Skripsi

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
TATA KELOLA KEUANGAN PADA PROGRAM KEBIJAKAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2022

(Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah)
Provinsi Sumatera Selatan

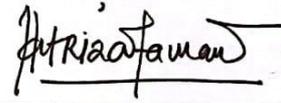
SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 21 Mei 2024

Pembimbing:

Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP. 196810221997022001



Penguji:

1. **Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si**

NIP. 199508142019032020

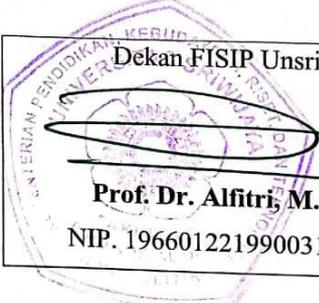


2. **Dian Anggraini, M.Si**

NIP. 198108142023212021



Mengetahui,

 Dekan FISIP Unsri Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004	Ketua Jurusan Administrasi Publik  Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001
--	--

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Daffa Lutfiansyah

NIM : 07011382025208

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Tata Kelola Keuangan Pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 17 Mei 2024
Yang Membuat


M. Daffa Lutfiansyah
NIM. 07011382025208

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesejahteraan bukanlah tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang memiliki”
pengelolaan keuangan yang bijak dan penuh integritas. (Oprah Winfrey)

“Pada dasarnya saat ini kita sedang berkembang dan kita tidak tahu batas potensi”
dalam diri kita. Meski kita sudah tahu batasnya, kita harus mengincar yang lebih
tinggi. (Daichi Sawamura)

“Aku tak akan bilang kau bisa berhasil kalau tak menyerah. Tapi, kalau kau”
menyerah, maka tak ada apa-apa lagi yang tersisa. (Aomine Daiki)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya.
2. Seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI.
3. Rekan seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik 2020.
4. Seluruh sahabat saya.
5. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya.

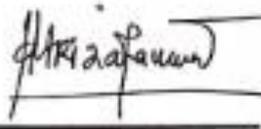
ABSTRAK

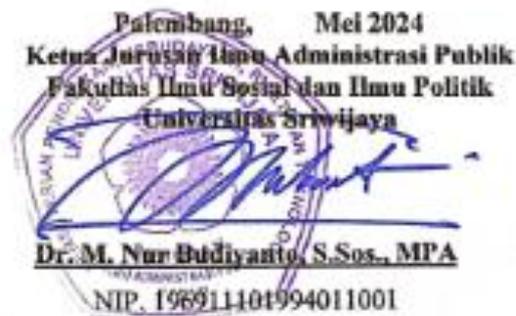
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola keuangan yang diterapkan dalam program kebijakan administrasi pembangunan tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Teori yang digunakan adalah teori tata kelola (pengelolaan) keuangan oleh Luther Gullick dalam Siagian (2014: 84) dengan dimensi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan dan penganggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang efektif dan transparan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan. Faktor-faktor seperti pengelolaan anggaran yang akuntabel, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan, Kebijakan Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001



Palembang, Mei 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1969111401994011001

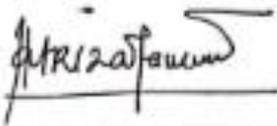
ABSTRACT

This study aims to analyze the financial governance applied in the 2022 development administration policy program at the Development Administration Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. The theory used is the theory of financial governance (management) by Luther Gullick in Siagian (2014: 84) with dimensions of planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that effective and transparent financial governance is very important in supporting the successful implementation of development administration policy programs. Factors such as accountable budget management, strict supervision, and active participation from various stakeholders are the main keys in maintaining the integrity and efficiency of the use of public funds.

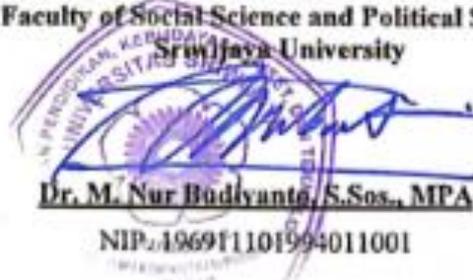
Keywords: *Financial Governance, Development Administration Policy, Development Administration Bureau*

Advisor

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001



Palembang, May 2024
Chairman of the Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Keuangan Pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”.

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua sebagai motivasi bagi penulis yang tidak pernah lelah memanjatkan doa, memberikan dukungan dan semangat, dan juga kepada:

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmunya dan memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku sebagai dosen pembimbing akademik.
6. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Keluarga besar Universitas Sriwijaya, terutama teman-teman Jurusan Administrasi Publik atas semua dukungan, semangat, dan kerjasamanya.

8. Kedua kakak, adik dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Tidak lupa pihak yang telah membantu dan menemani dalam penelitian ini yaitu Muhammad Aditya Gymnastiar, Kevin Argantara Putra, Jessica Esterina, Angelica Sasha, Kgs. Muhammad Rafli, Tasya Nabila Permata Putri, Nevia Ayuniwijaya Putri, Afra Nadila Salsabila, Muhammad Zaki, Muhammad Rizky Ramadhan dan Anisyah Risfidhayanti.
10. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Palembang, 17 Mei 2024

Penulis



M. Daffa Lutfiansyah
NIM. 07011382025208

DAFTAR ISI

TATA KELOLA KEUANGAN PADA PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2022	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Keuangan Sektor Publik	9
2.1.1 Pengertian Keuangan Sektor Publik	9
2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	9
2.1.3 Tujuan Anggaran Sektor Publik	12
2.2 Tata Kelola (Pengelolaan) Keuangan	14
2.2.1 Definisi Tata Kelola Secara Umum	14
2.2.2 Pengertian Tata Kelola (Pengelolaan) Keuangan	15
2.2.3 Fungsi Tata Kelola (Pengelolaan) Keuangan	16
2.2.4 Tujuan Tata Kelola (Pengelolaan) Keuangan.....	17
2.3 Teori Tata Kelola (Pengelolaan) Keuangan.....	18
2.4 Teori Yang Digunakan	22
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Kerangka Pemikiran	32

2.7 Asumsi Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Definisi Konsep	42
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Informan Penelitian	45
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7 Teknik Analisis Data	48
3.8 Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Deskripsi Tempat Penelitian	51
4.1.1 Sejarah Instansi	51
4.1.2 Tugas Pokok dan Isi (TUPOKSI)	53
4.1.3 Visi dan Misi Instansi.....	55
4.1.4 Struktur Biro Administrasi Pembangunan SETDA SUMSEL	55
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	63
4.3 Hasil Penelitian	63
4.3.1 Perencanaan Keuangan (<i>Planning</i>).....	63
4.3.2 Pengorganisasian Keuangan (<i>Organizing</i>).....	67
4.3.3 Kepegawaian Keuangan (<i>Staffing</i>).....	69
4.3.4 Pengarahan Keuangan (<i>Directing</i>).....	71
4.3.5 Koordinasi Keuangan (<i>Coordinating</i>).....	73
4.3.6 Pelaporan Keuangan (<i>Reporting</i>).....	76
4.3.7 Penganggaran Keuangan (<i>Budgeting</i>).....	79
4.4 Pembahasan Penelitian	86
4.4.1 Perencanaan Keuangan.....	87
4.4.2 Pengorganisasian Keuangan	90
4.4.3 Kepegawaian Keuangan	93
4.4.4 Pengarahan Keuangan	95
4.4.5 Koordinasi Keuangan	97
4.4.6 Pelaporan Keuangan.....	100
4.4.7 Penganggaran Keuangan	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106

5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	106
5.2.1 Saran Teoritis	106
5.2.2 Saran Praktis	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 2. Teknik Analisis Data.....	49
Gambar 3. Biro Administrasi Pembangunan SETDA SUMSEL.....	52
Gambar 4. Struktur Pegawai Biro Administrasi Pembangunan.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Staff Pengelolaan Keuangan.....	4
Tabel 2. Target dan Realisasi Anggaran Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4. Fokus Penelitian.....	44
Tabel 5. Informan Penelitian.....	63
Tabel 6. Matriks Hasil Penelitian.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia harus meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dalam bekerja untuk mencapai tujuannya. Tata kelola keuangan adalah serangkaian kegiatan yang baik dalam merancang strategi, membuat keputusan, mengendalikan, mengorganisir, serta memimpin atau mengarahkan sumber daya manusia, keuangan, material, dan informasi guna mencapai kinerja yang optimal tujuan dan sasaran. Selain sebagai sarana untuk mengekspresikan ketidaksetujuan setiap orang terhadap keadaan keuangannya, tata kelola keuangan juga berfungsi sebagai pengingat bagi setiap individu akan pentingnya mengelola uang dalam kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, membuat keputusan keuangan yang baik tidak diragukan lagi merupakan langkah yang diperlukan. Nilai tukar merupakan isu krusial yang menjadi perhatian banyak orang akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan mereka. Konsep yang dikenal sebagai "tata kelola keuangan" mencakup proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya keuangan pemerintah. Tujuan utama dari tata kelola keuangan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif, terbuka, dan akuntabel.

Prinsip utama mesti diterapkan di berbagai negara di dunia, tata kelola keuangan yang baik sangatlah penting. Memperkokoh strata serta institut sesuai dengan UU diteapkan valid merupakan kunci utama diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang efektif. Pelayanan publik yang ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, handal, dan responsif harus menjadi kebutuhan masyarakat modern. Ini termasuk tuntutan terhadap tata kelola PEMDA. Menurut (Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.) pengelolaan keuangan juga harus melangsungkan tindakan untuk mencegah anomali moneter, seperti inefisiensi alias pemanfaatan yang belum efisien. Tidak ada penataan moneter nan lurus dapat memungkinkan tindak pidana korupsi.

Keuangan sektor publik mencakup semua aktivitas keuangan yang terkait dengan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota), badan-badan publik, dan lembaga non-profit yang dimiliki pemerintah. Pemenuhan

kebutuhan masyarakat, stabilisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, pentingnya akuntabilitas dan transparansi, dan pembiayaan proyek prioritas adalah semua contoh bagaimana keuangan sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategis organisasi atau program pembangunan harus termasuk perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan mencakup penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi jangka panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semua tindakan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan baik perusahaan maupun lembaga pemerintah diatur oleh tata kelola keuangan, yang menjadikannya salah satu bidang yang sangat penting. Pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan biasanya merupakan kegiatan mengelola anggaran harian yang digunakan pelaksana dengan objek meraih ketentrangan moneter. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pelaksana moneter yang baik agar dana dapat dijaga dengan baik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggung jawab agar anggaran belum berhamburan serta melancarkan dengan kondisi tepat demi agar proses pengelolaan uang dan aset lainnya tidak mengganggu (Dwinta, 2010). Pada sektor publik, pengelolaan keuangan melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan (*planning*) perencanaan keuangan sektor publik mencakup pengembangan tujuan dan strategi keuangan untuk mencapai misi organisasi., pengorganisasian (*organizing*) pengorganisasian melibatkan penentuan struktur organisasi, pembagian tugas, dan pengaturan sumber daya keuangan, koordinasi (*coordinating*) melibatkan integrasi kegiatan keuangan agar berjalan sejalan dengan tujuan organisasi., penyusunan pegawai (*staffing*) pengadaan sumber daya manusia dalam konteks keuangan sektor publik melibatkan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan staf keuangan., pengarahan (*directing*) melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap staf keuangan dalam menjalankan tugas mereka, pelaporan (*reporting*) keuangan sektor publik melibatkan penyajian informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan, dan penganggaran (*budgeting*) penganggaran melibatkan penyusunan rencana anggaran yang mencerminkan alokasi dana untuk keperluan organisasi.

Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab untuk memberikan layanan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah provinsi,

termasuk penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, serta pelaksanaan TUPOKSI OPD provinsi di bagian pengelolaan. Bagian pengelolaan ini pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya untuk sinkronisasi, pembaharuan, pemantauan, kontrol, penilaian, dan laporan kemajuan pembangunan oleh pemerintah setempat dan pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting dalam pemerintahan daerah dan merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang dapat mengoptimalkan potensi pembangunan suatu wilayah untuk mencapai target pembangunan. Untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat. Karena prosedur dan keterbatasan media, pengelolaan keuangan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak selalu tersedia untuk publik. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui pengelolaan keuangan, yang menyebabkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Sejak penganggaran berbasis kinerja diterapkan, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan kinerja pemerintahannya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan masih menjadi salah satu masalah penting untuk dipelajari oleh organisasi sektor publik seperti pemerintahan. Semakin meningkatnya tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengurangi pemborosan, kebocoran dana, dan program yang tidak layak secara ekonomi. Sistem pelaporan dan audit yang tidak efektif dapat menyebabkan kebocoran dana terjadi tanpa terdeteksi, dan kegagalan untuk mengaudit atau memeriksa transaksi keuangan suatu organisasi dapat menyebabkan kebocoran dana terjadi tanpa terdeteksi. Namun kenyataan, masih terjadi kendala pengelolaan pada instansi tersebut. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara prioritas program kebijakan dan pelaporan keuangan (*reporting*). Jika kebutuhan mendesak atau strategis tidak diberikan prioritas yang memadai, maka pelaporan tidak akan mencerminkan

kebutuhan sebenarnya, kedua adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam aspek penempatan pegawai (*staffing*). Hal ini dapat menghambat pengelolaan keuangan dan menyebabkan kesalahan dalam penentuan prioritas.

Tabel 1. Tabel Staff Pengelola Keuangan

No	Program/Kegiatan	Jumlah Staff Pengelola Keuangan
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	5
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	5
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3
4	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	3
5	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4
6	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Sumsel, 2024

Adanya ketidaksesuaian *staff* pengelola keuangan pada kegiatan (3) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, prioritas kepegawaian yang tidak sesuai dengan tata kelola keuangan sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam anggaran program. Misalnya, alokasi anggaran yang tidak proporsional untuk rekrutmen, pelatihan, atau kompensasi karyawan bisa menjadi tanda ketidaksesuaian prioritas kepegawaian dengan kebutuhan keuangan.

Adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan realisasi pengelolaan tidak mencapai target, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 2. Target dan Realisasi Anggaran Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Target		Realisasi	
		Rp	%	Rp	%
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	200.000.000	100	157.195.202	78,60
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	150.000.000	100	127.832.855	85,22
3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	225.000.000	100	79.396.722	35,29
4	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	125.000.000	100	87.927.000	70,34
5	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125.000.000	100	85.110.000	68,09
6	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	125.000.000	100	97.813.400	78,25

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumsel, 2024

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan mencakup 6 kegiatan, yaitu (1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, (2) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (3) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, (4) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, (5) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, (6) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah. Realisasi program pada tahun anggaran 2022 masih dibawah target (100%), realisasi kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah hanya mencapai 35,29%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Tata Kelola Keuangan Pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Secretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan) belum berjalan maksimal.

Menurut (Luther Gullick, Siagian 2014) menjelaskan bahwa tata kelola (pengelolaan) yang baik mencakup 7 unsur, yaitu (1) *Planning* merupakan tindakan

memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu, (2) *Organizing* diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama di suatu institusi, (3) *Staffing* melibatkan seleksi, pelatihan, dan penempatan sumber daya manusia yang sesuai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi, (4) *Directing* merupakan penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan, (5) *Coordinating* merupakan satu dari beberapa fungsi pengelolaan untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi, (6) *Reporting* merupakan menyusun laporan tentang kinerja organisasi dan individu untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi pencapaian tujuan, (7) *Budgeting* merupakan fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi.

Penelitian terdahulu terkait tata kelola keuangan sudah banyak diteliti, namun dalam aspek yang berbeda-beda. (Nasution, 2018); (Hidayah et al., 2021); (Gustar, 2021); (Ratna, 2023);(Waruwu et al., 2023) mengkaji aspek perencanaan (*planning*) dalam penelitian mereka membahas bagaimana perencanaan tata kelola keuangan, (Palalangan et al., 2019) meneliti dalam aspek pengorganisasian (*organizing*) bahwa sektor pariwisata di objek wisata "Kete' Kesu" di Kabupaten Toraja Utara telah

dikelola dengan baik, seperti yang dapat dilihat dari cara pengelolaannya, (Widiastuti et al., 2022) meneliti dalam aspek pengarahan (*directing*) bahwa masih dalam tahap konsolidasi kelembagaan karena beberapa unit usaha BUMDes sudah berdiri sebelumnya, (Gaol et al. , 2023) meneliti dalam aspek pelaporan (*reporting*) laporan keuangan masih sangat sederhana, tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran kas sama sekali, (Tafyiroh, 2023) meneliti dalam aspek penganggaran (*budgeting*) bahwa yaitu penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, dari pemerintah ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, terutama pada aspek dan lokus. Penelitian ini lebih komprehensif karena semua aspek dikaji yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan pegawai (*staffing*), pengarahan (*directing*), koordinasi (*coordinating*), pelaporan (*reporting*), dan penganggaran (*budgeting*). Lokus penelitian ini adalah Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, maka penelitian ini perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Keuangan Pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan para aktor yang terkait dalam pengelolaan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan tata kelola yang dilaksanakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di Latar Belakang, maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam laporan ini adalah “Bagaimana Tata Kelola Keuangan Pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis tata kelola keuangan pada program kebijakan administrasi pembangunan tahun 2022 pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti Administrasi Publik, khususnya terkait tata kelola keuangan publik.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta solusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini seperti, menetapkan prioritas dengan mengidentifikasi proyek atau program yang paling kritis dan memiliki dampak positif terbesar pada pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214.
<https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Creswell. (2018). Mixed methods procedures. In *research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Dwinta, I. dan C. Y. (2010). Pengaruh locus of control, financial knowledge, income terhadap financial management behavior. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(3), 131–144.
- Gaol, B., & M, A. H. (2023). Implementasi tata kelola keuangan sesuai sak emkm pada umkm di kabupaten samosir. 2(1), 19–24.
- Gullick, L. (2014). Manajemen pengelolaan keuangan (1st ed.). Sondang P. Siagian.
- Hidayah, D. F., Susbiyani, A., & Yuliarti, N. C. (2021). Pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pelaksanaan apbdes program pembangunan. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 3(1), 15–23.
<https://doi.org/10.31539/budgeting.v3i1.2136>
- Hidayat Waruwu, Gulo, S., Lahagu, P., Halawa, O., & Laia, O. (2023). Analisis tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. 2(1), 44–47.
- Ikhsan, A., Alfurkaniati, L. S., Lubis, P. K. D., Dalimunthe, M. I., & Abdullah, I. (2016). *Analisa Laporan Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Medan.
- Irfani. (2020). Pengelolaan keuangan konsep dan definisi. *NBER Working Papers*, 89.
<http://www.nber.org/papers/w16019>
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintahan daerah (1st ed.). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN 2007.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. ANDI.
<http://lib.kemenperin.go.id/neo/detail.php?id=232668>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (1st ed.). ANDI.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/203579/akuntansi-sektor-publik>
- Miles, H. M. (2016). Data analysis qualitative. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (Vol. 30, Issue 25).
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah,

- akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162. <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Palalangan, Natalia Paranoan, & Erna Pasanda. (2019). Tata kelola keuangan pada objek wisata ke'te kesu di kabupaten toraja utara. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(2), 59–72. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i2.879>
- Peraturan pemerintah (pp) nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/ daerah, Pub. L. No. 39. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4761>
- Purba. (2022). Analisis pengelolaan keuangan program pemberdayaan ekonomi keluarga bkkbn porvinsi kalimantan selatan. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(02), 133–140.
- Puswanti, P. D. (2018). Konsep anggaran sektor publik. *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Ratna, N. (2023). Tata kelola keuangan berbasis aplikasi “si apik” bagi pengelola umkm sub sektor manakan dan minuman di kota pekanbaru. 4(5), 356–365.
- Sugiarti, S. (2020). Penerapan tata kelola keuangan pada pelaku usaha di kelurahan jimus kecamatan polanharjo kabupaten klaten. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 69–75. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1357>
- Tafyiroh, M. E. (2023). Sistem pengelolaan keuangan program pendidikan gratis di pondok pesantren kreatif baitul kilmah bantul. 13, 20–29. <https://doi.org/0.15642/jkpi.2023.13.1.20-29>
- Teta Midra; Asdi Gustar, I. W. S. (2021). Tata kelola keuangan nagari dan implikasinya terhadap pembangunan nagari di kecamatan x koto diatas kabupaten solok. 1(1), 85–112.
- Undang-undang (uu) nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pub. L. No. 17. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Widiastuti, H., Yunianto, A., & Rahmawati, E. (2022). Evaluasi tata kelola keuangan dan sistem akuntansi di bumdes mekaring pono potorono. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 131–143. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.13485>